

**PERTANGGUNGJAWABAN ADMINISTRATIF
DALAM PENEGAKAN DISIPLIN MILITER PADA
LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
ANGKATAN DARAT**

SKRIPSI



Oleh :

MOCH. NAUFAL FADHIL AKBAR

NPM : 22300108

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

2026

**PERTANGGUNGJAWABAN ADMINISTRATIF DALAM
PENEGAKAN DISIPLIN MILITER PADA LINGKUNGAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH :

MOCH. NAUFAL FADHIL AKBAR

NPM: 22300108

SURABAYA, 12 JANUARI 2026

MENGESAHKAN,

DEKAN,

Dr. EDI KRISHARYANTO S.H., M.H., C.P.M., Adv.

PEMBIMBING,

SETO CAHYONO S.H., M.Hum.

**PERTANGGUNGJAWABAN ADMINISTRATIF DALAM
PENEGAKAN DISIPLIN MILITER PADA LINGKUNGAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

MOCH. NAUFAL FADHIL AKBAR

NPM: 22300108

TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA HARI SENIN, 12 JANUARI 2026

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. NOOR TRI HASTUTI S.H., M.Hum

(KETUA)

1.....

2. SHANTI WULANDARI, S.H., M.Kn., CCD.

(ANGGOTA)

2.....

3. SETO CAHYONO S.H., M.Hum

(ANGGOTA)

3.....

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunianya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN ADMINISTRATIF DALAM PENEGAKAN DISIPLIN MILITER PADA LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT**” dengan tepat waktu dan diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Tentunya, dalam penulisan skripsi ini diperlukan usaha dan tekad yang kuat sehingga karya penulisan ini dapat diselesaikan dengan sempurna. Oleh karenanya, mengawali dengan penuh rasa hormat penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sangat mendalam dan tak terhingga kepada :

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. Dr. Ir Raden Roro Nugrahini Susantinah Wisnujati M.Si yang telah memberi kesempatan penulis untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Dr. Edi Krisharyanto S.H., M.H.,C.P.M., Adv yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama penulis mengikuti perkuliahan.
3. Ibu Shanti Wulandari, S.H.,MKn.,CCD Selaku Kaprodi S-1 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang memberikan kemudahan dalam penyusunan KRS sekaligus Dosen Wali yang telah memberikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan.
4. Bapak Seto Cahyono S.H.,M.Hum Selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Moch Naufal Fadhil Akbar

NPM : 22300108

Alamat : Jl. Dupak Bangunsari Gang 2 No.20, RT 03/RW 04 Kel.Dupak
Kec.krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60179

No. Telp. (HP) : 087866171681

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN ADMINISTRATIF DALAM PENEGAKAN DISIPLIN MILITER PADA LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan di jatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 12 Januari 2026

Yang Menyatakan,



Moch Naufal Fadhil Akbar

NPM : 22300108

ABSTRAK

Penegakan disiplin militer merupakan unsur fundamental dalam menjaga profesionalitas Tentara Nasional Indonesia (TNI), khususnya TNI Angkatan Darat yang memiliki fungsi strategis dalam pertahanan negara. Sistem pertanggungjawaban administratif berperan penting sebagai mekanisme pengawasan dan pengendalian terhadap pelanggaran disiplin yang tidak memenuhi unsur pidana, namun tetap berdampak pada kepatuhan hierarki dan tata tertib militer. Studi ini menelaah bagaimana pertanggungjawaban administratif diterapkan dalam sistem pembinaan disiplin militer, termasuk kedudukan, prosedur, dan instrumen hukum yang mengaturnya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta konsep pertanggungjawaban administratif dalam konteks hukum militer Indonesia. Sumber hukum yang dikaji mencakup Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Peraturan Disiplin Militer, serta ketentuan internal TNI Angkatan Darat. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi efektivitas sistem administratif dalam menegakkan disiplin tanpa mengabaikan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kepatuhan terhadap rantai komando.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban administratif dalam lingkungan TNI Angkatan Darat telah berjalan melalui mekanisme pembinaan, pemeriksaan, dan penjatuhan hukuman disiplin, namun masih terdapat kendala terkait konsistensi penerapan, transparansi proses, dan harmonisasi regulasi antara peraturan disiplin internal dengan hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan kerangka regulatif serta penguatan kapasitas aparat pembina disiplin agar penegakan disiplin militer dapat berlangsung secara lebih proporsional, akuntabel, dan sejalan dengan prinsip good governance dalam institusi pertahanan.

Kata Kunci: Disiplin Militer, Pertanggungjawaban Administratif, TNI Angkatan Darat, Hukum Militer, Penegakan Hukum.

ABSTRACT

Military discipline is a fundamental element in ensuring the professionalism of the Indonesian National Armed Forces (TNI), particularly the Army, which holds a strategic role in national defense. The administrative accountability system functions as a key mechanism for supervising and controlling disciplinary violations that do not fulfill criminal elements but nonetheless affect hierarchical compliance and military order. This study examines how administrative accountability is implemented in the military disciplinary framework, including its legal basis, procedures, and regulatory instruments.

This research employs a normative legal method focusing on the analysis of legislation, legal doctrines, and the concept of administrative accountability within the context of Indonesian military law. The legal sources examined include Law Number 34 of 2004 on the TNI, Military Discipline Regulations, and internal provisions of the Indonesian Army. The analysis aims to identify the effectiveness of the administrative system in enforcing discipline while upholding justice, legal certainty, and adherence to the chain of command.

The findings indicate that the administrative accountability system within the Indonesian Army operates through mechanisms of supervision, examination, and disciplinary sanctions. However, several challenges remain, including inconsistent implementation, limited procedural transparency, and the need for harmonization between internal military discipline regulations and national legal norms. Thus, regulatory refinement and capacity strengthening for disciplinary officers are necessary to ensure that military discipline enforcement is conducted proportionally, accountably, and aligned with principles of good governance in defense institutions.

Keywords: *Military Discipline, Administrative Accountability, Indonesian Army, Military Law, Law Enforcement.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Kerangka Konseptual	9
1.5.1 Konsep Pertanggungjawaban Hukum Administrasi.....	9
1.5.2 Konsep Disiplin Militer	15
1.5.3 Konsep Pertanggungjawaban Anggota TNI AD atas Pelanggaran Disiplin Militer	19
1.6 Metode Penelitian.....	23
1.6.1. Tipologi Penelitian	23
1.6.2 Metode Pendekatan	25
1.6.3 Bahan Hukum.....	27
1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	28

1.6.5 Analisa Bahan Hukum.....	28
1.7 Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan.....	28
BAB II PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN ADMINISTRATIF DALAM PENEGAKAN DISIPLIN MILITER PADA LINGKUNGAN TNI ANGKATAN DARAT	31
2.1 Dasar Hukum dan Prinsip Disiplin Militer di Indonesia	31
2.2 Jenis, Klasifikasi, dan Mekanisme Penegakan Disiplin Militer	36
BAB III MEKANISME DAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN DISIPLIN OLEH ANGGOTA TNI ANGKATAN DARAT	45
3.1 Mekanisme Penjatuhan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Disiplin Prajurit TNI AD.....	45
3.2 Efektivitas Pelaksanaan Sanksi Administratif dalam Menegakkan Disiplin Prajurit TNI AD.....	68
BAB IV PENUTUP	85
4.1 Kesimpulan	88
4.2 Saran.....	89
DAFTAR BACAAN	91